DOKTRIN *PIERCING THE CORPORATE VEIL*: KETENTUAN DAN PENERAPANNYA DI INGGRIS, AUSTRALIA DAN INDONESIA

Yafet Y. W. Rissy

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Korespondensi: yafet.rissy@uksw.edu

Abstrak

Artikel ini membahas ketentuan dan penerapan doktrin *Piercing The Corporate Veil* (PVC) di Inggris, Australia dan Indonesia. Isu utamanya adalah kapan dan bagaimana pengadilan dapat menerapkan doktrin PVC? Apakah doktrin PVC bisa diterapkan di luar pengadilan? Dalam tradisi *common law*, di Inggris dan Australia, pengadilan dapat menerapkan doktrin PVC bagi pemegang saham dan direktur jika terdapat keadaan khusus yang menjamin untuk dilakukan. Hal yang sama terjadi di Indonesia dimana jauh sebelum Undang-Undang PT berlaku pertama kali tahun 1995, Mahkamah Agung RI telah menerapkan doktrin PVC. Bahkan di Indonesia, terjadi peristiwa hukum yang unik dan di luar kelaziman hukum perusahaan dimana dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia tahun 1998, Badan Penyehatan Perbankan Nasional menerapkan model *out of court settlement* untuk meminta pertanggung jawaban pribadi pemegang saham. Disarankan agar dilakukan kajian hukum dan ekonomi untuk melihat efektifitas pendekatan ini.

Kata Kunci: *Piercing the Corporate Veil*; Perusahaan; Pemegang Saham; Direktur; Komisaris.

Abstract

This article discusses about provisions and application of the *Piercing The Corporate Veil* (PVC) doctrine in the United Kingdom, Australia and Indonesia. The main issue is when and how the courts apply the PVC doctrine, also whether the doctrine can be applied outside the courts or not. In some states such as the United Kingdom and Australia which exercise common law tradition, the courts may apply the PVC doctrine on share holders and directors when there is an exceptional circumstance which requires to apply the doctrine. Similar to both states, Indonesia, through the Indonesian Supreme Court, has already applied the doctrine long before the law on Limited Liability Company was enacted. In 1998, a unique legal case about the Liquidity Aid of Bank Indonesia shows a phenomenon that was beyond the normal understanding of the Law. In that time, the Indonesian Bank Restructuring Agency applied an out-of-court settlement model to hold shareholders' liability. Finally, this article recommends that a legal and economic study should be considered to examine the effectiveness of this approach.

Keywords: *Piercing the Corporate Veil*; Company; Shareholders; Director; Commissioner.

PENDAHULUAN

Perusahaan, dalam perspektif Teori Fiksi (*Fiction Theory*) adalah *artificial person*, yang tidak memiliki wujud (*intangible*), keinginan (*will*), realitas yang substansial (*substantial reality*) yang lahir karena hukum.¹ Oleh karenanya perusahaan adalah sebuah *legal person*, yang karenanya memiliki kedudukan, hak dan tanggung jawab hukum yang sebagaimana layaknya *natural person* tetapi perusahaan merupakan sebuah entitas hukum terpisah (*separated legal entity*) dari direktur dan pemegang saham.² Dengan demikian, direktur dan pemegang saham memiliki kewajiban tersendiri yang terlepas dari perusahaan sebagaimana diakui dalam undang-undang (UU) perusahaan di berbagai yurisdiksi.

Persoalannya ialah apakah direktur dan pemegang saham dapat dituntut? Bagaimana, kapan dan dalam hal apa direktur (dan komisaris dalam konteks Indonesia) dan pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban pribadinya atau dalam hal apa doktrin *Piercing The Corporate Veil*³ (PVC) dapat diterapkan pengadilan? Persoalan yang lebih krusial di Indonesia adalah apakah pertanggungjawaban pemegang saham yang melebihi sahamnya dapat

dilakukan di luar pengadilan? Artikel ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dengan cara meninjau ketentuan dasar baik dalam aturan *common law* maupun dalam UU Perusahaan.

PEMBAHASAN

Doktrin PVC

Secara prinsip, doktrin PVC merupakan ajaran yang berkembang dalam tradisi *common law* di Inggris sejak 122 tahun silam. Dalam tradisi *common law*, pemegang saham sebuah perusahaan dibebaskan dari pertanggungjawaban pribadi atas kewajiban perusahaan (*corporate veil*).⁴ Namun demikian, dalam keadaan tertentu doktrin PVC pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban atas utang dan kewajiban perusahaan sekaligus pertanggungjawaban hukum.⁵

Perusahaan atau perseroan pada umumnya maupun perseroan terbatas secara konsep, sebagaimana didefinisikan oleh Mahkamah Agung Amerika, sejatinya merupakan sesuatu (institusi) yang artifisial, tidak terlihat, tidak berwujud dan yang hanya hadir atau ada karena hukum, merupakan *artificial person* dan entitas yang terpisah dari direktur dan pemiliknya.⁶ Sebagai subyek hukum, perusahaan

¹ Ben Pettet, *Company Law* (2nd edn, Pearson Education Limited 2005) 68.

² Adolf A. Berle Jr, 'The Theory of Enterprise Entity' (1947) 47 (3) *Columbia Law Review* 343, 343.

³ Doktrin PVC memiliki akar dalam tradisi *common law* yang berkembang di Inggris lalu menyebar ke negara yang dipengaruhi oleh tradisi *common law* seperti Amerika, Irlandia, Australia, Kanada, New Zealand, Afrika Selatan, dalam tingkat tertentu juga diadopsi di negeri negara dengan tradisi *civil law* seperti Jerman dan Indonesia. Tentang awal muasal lahirnya doktrin PVC dalam kaitannya dengan konsep perusahaan sebagai *separated legal entity*, lihat Larry S. Bryant, 'Piercing the Corporate' (1982) 87 (6) *Commercial Law Journal* 229-302.

⁴ Milton Bordwin, 'Piercing the Corporate Veil' (1995) 84 (8) *Management Review* 37, 37.

⁵ Angela Schneeman, *The Law Of Corporations and Other Business Organizations* (5th edn, Delmar Cengage Learning 2010) 246.

⁶ Sandra K. Millier, 'Piercing The Corporate Veil Among Affiliated Companies In The European Community and In The U.S.: A Comparative Analysis Of U.S., German, and U.K. Veil-Piercing Approaches' (1998) 36 (1) *American Business Law Journal* 73, 74.

memiliki tujuan, hak dan kewajiban di depan hukum. Tetapi karena perusahaan adalah subyek hukum bukan orang, perusahaan tidak bisa bertindak untuk dan atas namanya. Disinilah, direktur sebagai subyek hukum natural atau orang (*natural person*), memiliki tugas dan tanggung jawab untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan.

Lazimnya, utamanya dalam perusahaan terbatas (*limited liability company*), tanggung jawab pemegang saham terbatas pada saham yang dimilikinya. Dalam konteks ini, jika tindakan yang diambil perusahaan melalui direkturnya atau atas kendali dan perintah pemegang saham, membawa kerugian bagi perusahaan atau terdapat perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi perusahaan, walaupun pemegang saham harus ikut bertanggung jawab, maka pertanggungjawaban tersebut terbatas pada sahamnya. Prinsip ini berlaku umum dan sama di berbagai negara Inggris, Kanada, New Zealand, Belanda, Jerman, Italia, termasuk Indonesia dan masih banyak lagi, yang dikenal doktrin PVC atau menyingkap tabir/tirai perusahaan atau dalam teori hukum dikenal sebagai *alter ego doctrine*.⁷

Konstruksi Doktrin PVC Di Inggris

1. Doktrin PVC Konsep *Limited Liability* dan Pertanggungjawaban Pemegang Saham di Inggris

Menurut UU Perusahaan terkini di Inggris tahun 2006 (maupun dalam UU sejenis tahun 1995), tanggung jawab pemegang saham terbatas pada kontribusi modalnya, bisa berupa saham atau aset. Di Inggris terdapat dua jenis perusahaan terbatas, perusahaan terbatas oleh saham (*limited by shares*)⁸ dan perusahaan terbatas oleh jaminan (*limited by guarantee*).⁹

2. Doktrin PVC dan Direktur di Inggris

Sementara itu terkait tanggung jawab hukum dan pribadi direktur, di Inggris, direktur dalam menjalankan tugasnya baik tugas *common law* yakni *duty of care*: tugas bertindak dengan kepedulian, hati-hati dan keahlian dan tugas fidusia yakni tugas bertindak dengan itikad baik (*good faith*) dan untuk kepentingan terbaik perusahaan (*in the best interest of the company*), tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, kecuali jika terbukti terdapat kelalaian, kegagalan atau pelanggaran terhadap tugas direktur.¹⁰ Dengan kata lain, doktrin PVC yang melindungi direktur dapat diangkat pengadilan jika

⁷ Stacey Hunt, 'Piercing The Corporate Veil' 1995 13 (2) Paralegal Today 68, 68.

⁸ Dalam hal perusahaan terbatas oleh sahamnya, maka tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah sahamnya dan jika ada saham yang belum dibayarkan, tanggung jawabnya terbatas pada jumlah saham yang belum dibayarkan masing-masing pemegang saham tersebut. S 3 (2) of the UK Companies Act 2006.

⁹ Dalam hal perusahaan terbatas oleh jaminan, maka tanggung jawab anggotanya terbatas pada jumlah tertentu yang dikontribusi pada aset (kekayaan) perusahaan ketika perusahaan dibubarkan. Tanggung jawab pemegang saham untuk menyumbang pada aset (kekayaan) ini dibuat secara spesifik dalam anggaran dasar perusahaan dan biasanya berlaku bagi perusahaan dengan tujuan *non-profit* atau perusahaan tujuan pelayanan/sosial (*caritative*). S 3 (3) of the UK Companies Act 2006.

¹⁰ The UK Companies Law 2006, S 232 (1).

direktur bertindak dengan itikad jahat, sembrono, tidak disertai informasi yang cukup, tidak jujur, dan melayani kepentingan dirinya sendiri.

3. Penerapan Doktrin PVC oleh Pengadilan di Inggris

Bagaimana doktrin PVC diterapkan bagi pemegang saham dan direktur di Inggris? Untuk memastikannya, perlu diperiksa bagaimana pengadilan di Inggris menginterpretasikan dan melaksanakan doktrin PVC.

Namun sebelum jauh melihat penerapan doktrin PVC, perlu diselidiki terlebih dahulu tradisi dalam *common law* di Inggris yang membatasi tanggung jawab pemegang saham sebatas saham yang dimilikinya. Putusan klasik pengadilan di Inggris yang darinya dapat dilihat perlindungan terhadap pemegang saham adalah dalam kasus *Salomon v Salomon & Co* tahun 1897.

Kasus ini bermula ketika Salomon, seorang pedagang kulit dan pembuat sepatu yang mendirikan perusahaannya tahun 1892. Salomon, istri dan tiga anaknya adalah pemegang saham dari perusahaan ini. Ketika perusahaan dilikuidasi karena mengalami kesulitan keuangan, pertanyaan yang timbul adalah apakah Salomon harus membayar kreditur yang tidak terjamin (*unsecured creditor*) dari uang pribadinya?¹¹

Pengadilan Rendah (tingkat pertama) memutuskan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang dikendalikan satu orang dan karenanya adalah palsu. Artinya Salomon harus bertanggung jawab secara

pribadi. Tanggung jawab pribadi Salomon juga disahkan oleh Pengadilan Banding dengan alasan bahwa UU tidak pernah bermaksud untuk mendirikan perusahaan yang hanya terdiri dari: 'satu orang penting dan enam orang bodoh'. Namun, *House of Lords* dengan suara bulat berbalik, memutuskan bahwa tidak ada dalam UU yang melarang rancangan Salomon.¹² Artinya Salomon dibebaskan dari tanggung jawab pribadinya.

House of Lords lalu mengatakan bahwa tirai perusahaan akan diangkat untuk meminta pertanggungjawaban pribadi hanya dalam keadaan yang luar biasa. Yurisdiksi untuk mengangkat tirai perusahaan merupakan sebuah diskresi dan memungkinkan pengadilan melakukan keadilan dan untuk memutuskan kasus individu sesuai dengan pertimbangan yang adil.¹³ Berikut sejumlah alasan yang dipakai pengadilan di Inggris untuk mengangkat tirai pelindung perusahaan.

Pertama, adanya kecurangan dan penggunaan hukuman keadilan (*equitable remedies*). Dalam kasus, *Gilford Motor Co Ltd v Horne*, tergugat dipekerjakan para penuntut sebagai direktur utama. Dalam kontrak kerjanya, terdapat ketentuan yang restriktif bahwa setelah masa kerjanya berakhir, tergugat tidak boleh mengambil pelanggan para penggugat. Tetapi tergugat mengambil juga pelanggan para penggugat. Caranya, tergugat mendirikan perusahaan yang sejak awal dimaksudkan merebut pelanggan dari mantan perusahaannya, dimana dia sendiri bertindak

¹¹ Sandra K. Millier, *Op.Cit.*, 112.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

sebagai pekerja tetapi sahamnya dimiliki semuanya oleh istrinya dan seorang pekerja lainnya. Pengadilan Banding menetapkan perusahaan tergugat sebagai 'jubah atau kepalsuan', dibentuk hanya sebagai 'perangkat atau strategi' untuk 'menutupi pengambilalihan'. Pengadilan memerintahkan tergugat agar perusahaannya berhenti melanggar perjanjian tergugat dan para tergugat.¹⁴

Kedua, penggunaan perusahaan sebagai sebuah agen atau *nominee*. Kasus seperti ini muncul karena hubungan agensi antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Perusahaan induk seolah bertindak sebagai tuan (prinsipal) sementara anak perusahaan adalah agennya. Jadi ini adalah *implied agency* (agensi tersirat). Dalam kasus *Stone dan Knight Ltd v Birmingham Corporation*, hakim Atkinson J mengungkapkan bahwa perusahaan induk yang memiliki properti (Birmingham Corporation) dapat mengklaim kompensasi ketika terdapat pemindahan dan gangguan, padahal yang menempati properti dan menjalankan bisnis itu adalah anak perusahaannya. Masalahnya ialah bahwa anak perusahaan beroperasi di properti tersebut, bukan atas namanya sendiri, tetapi atas nama perusahaan induk. Setelah memeriksa tingkat kontrol dan penerimaan keuntungan dari bisnis oleh perusahaan induk, Hakim Atkinson J menyimpulkan bahwa:

Jika suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai agen atau karyawan, atau alat atau patung bagi yang lainnya, saya pikir [anak perusahaan] yang dalam hal ini adalah badan hukum, karena hanya

itu saja. ... Saya puas bahwa bisnis itu milik para penuntut, mereka adalah ... penjajah yang sebenarnya di tempat itu.¹⁵

Ketiga, dalam kelompok perusahaan, anak perusahaan tidak terpisah dan independen dari perusahaan induk. Masalah muncul ketika ketika perusahaan induk menganggap anak perusahaan sebagai perusahaan yang terpisah dan independen dari induknya. Dalam kasus *Littlewoods Mail Order Stores Ltd v IRC*, Hakim Denning MR mengangkat tirai antara perusahaan induk dan anak perusahaan dalam sebuah kasus pajak penghasilan dengan alasan yang sebagian besarnya sama dengan yang ada dalam kasus agensi terselebung di atas (alasan kedua) yakni anak perusahaan hanya sebagai alat atau masker untuk menutupi kejahatan. Dalam hal ini pengadilan menolak untuk memperlakukan anak perusahaan sebagai entitas yang terpisah dan independen dari induk.¹⁶

Keempat, adanya kasus *partnership* semu (*quaisi partnership*). Prinsipnya menurut UU Perusahaan bahwa sekali terbentuk, perusahaan harus diperlakukan dengan cara yang sama. Tetapi jika terdapat perilaku praperadilan yang tidak adil (*unfair prejudicial behaviour*) dan keadilan dinistakan, pengadilan dapat mempertimbangkan hukuman bagi pemegang saham yang diwajibkan UU. Dalam kasus seperti ini pengadilan memeriksa apa yang ada dibalik pendirian dan pengelolaan perusahaan, apakah perusahaan tersebut dibentuk dan dijalankan sebagai suatu hubungan kepercayaan timbal balik dan terdapat kepercayaan antara para pendiri atau

¹⁴ Simon Goulding, *Company Law* (2nd edn, Cavendish Publishing Limited London 1999) 67.

¹⁵ *Ibid.*, 73.

¹⁶ *Ibid.*, 75.

sebagai *partnership* semu. Jika yang terjadi adalah *partnership* semu, maka pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk dibebaskan dari tanggung jawabnya.¹⁷ Artinya karena pemegang telah menginvestasikan modalnya ke dalam sebuah perusahaan semu sehingga jika terbukti perusahaan melakukan kejahatan, maka pemegang saham dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agar terhindar dari tanggung jawab hukum.

Dalam perjalanannya, penerapan doktrin PVC oleh pengadilan sempat dipertanyakan validitasnya karena ketiadaan perintah UU (*statutory obligation*) sebagaimana disentil MA Inggris Raya tahun 2013 dalam kasus *VTB Capital Inc. v Nutritek International Corp.*¹⁸ Namun empat bulan setelah putusan di atas, MA Inggris Raya dalam kasus *Perst v Petrodel Resources Limited* kembali menegaskan bahwa pengadilan memiliki yurisdiksi *common law* untuk mengangkat tabir perusahaan, setidaknya jika terdapat keadaan khusus tertentu mengharuskannya.¹⁹

Selanjutnya menurut pengadilan di Inggris, PVC dapat diterapkan atau tirai perusahaan yang melindungi pemegang saham atau direktur dapat diangkat pengadilan jika terdapat dua faktor utama yakni a) pemegang saham dalam tingkat tertentu telah secara dominan mengontrol perusahaan²⁰ dan b) adanya tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk melakukan penipuan atau tindakan

lainnya untuk menghindari kewajiban hukum.²¹

Terkait kedua alasan tersebut, tirai yang melindungi pemegang saham dan direktur (*corporate veil*) dicabut pengadilan di Inggris karena:²²

- a) pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) telah menggunakan perusahaan untuk tujuan yang ilegal (*illegal purpose*) dan tujuan tidak tepat (*improper purpose*);
- b) pemegang saham mendirikan perusahaan untuk menghindari tanggung jawab hukum;
- c) jaringan perusahaan atau perwalian (termasuk di luar negeri) digunakan untuk menyembunyikan yang diperoleh dari hasil kejahatan;
- d) adanya keinginan pemegang saham untuk melepaskan saham atau kepentingan atau aset di lembaga perwalian atau perusahaan yang bertentangan dengan hukum sehingga dilarang pengadilan;
- e) perusahaan digunakan untuk menghindari kewajiban untuk membayar manajer yang dipecat;
- f) sehubungan dengan gugatan atas kerugian yang timbul dari penggunaan dana perusahaan oleh pemegang saham secara individu untuk memperoleh kendali atas perusahaan publik.

Dengan demikian perlindungan terhadap (*corporate veil*) bagi direktur dan pemegang saham di Inggris dapat diangkat jika pemegang saham

¹⁷ *Ibid.*, 78.

¹⁸ Thomas Heintzman G., Q. C. and Brandon Kain, 'Through the Looking Glass: Recent Developments in Piercing the Corporate Veil' (2013) 28 (3) Banking & Finance Law 525, 525.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Untuk alasan ini, lihat juga R. Thompson, 'Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study' (1991) 76 (5) Cornell Law Review 1036-1074.

²¹ Beaufrot, dalam Sandra K. Millier, *Op.Cit.*, 109-110.

²² *Ibid.*

pengendali telah secara salah menggunakan posisinya dalam menggunakan perusahaan untuk kepentingan ilegal atau kejahatan, dan jika direktur mendirikan dan mengelola perusahaan palsu untuk melakukan tindakan curang atau kejahatan.

Konstruksi Doktrin PVC Di Australia

1. Doktrin PVC, Konsep *Limited Liability* dan Pertanggungjawaban Pemegang Saham di Australia

Terdapat tiga jenis perseroan terbatas di Australia, perusahaan terbatas oleh saham,²³ perusahaan terbatas oleh jaminan²⁴ dan perusahaan terbatas oleh keduanya, saham dan jaminan. Sebagaimana di Amerika dan Inggris, prinsip yang sama berlaku, bahwa PT adalah entitas hukum yang terpisah (*separated legal entity*) dengan pemiliknya, pemegang saham tidak dapat dimintai pertanggungjawaban melebihi sahamnya. Dalam hal utang perusahaan misalnya, ditegaskan bahwa pemegang saham akan membayar sejumlah tertentu sesuai porsi sahamnya, jika mereka diminta untuk melakukannya.²⁵

Dalam hal seorang direktur adalah juga seorang pemegang saham, direktur tersebut tunduk pada hukum lainnya atau praktek komersial lainnya yakni bertanggung jawab atas utang perusahaan ketika perusahaan tidak

sanggup membayar saat utang tersebut jatuh tempo, mengganti kerugian perusahaan karena melanggar tugas direktur. Sebagai tambahan atas kedua tanggung jawab tersebut, direktur yang adalah juga pemegang saham tersebut dapat didenda oleh pengadilan sipil. Selain itu, jika perusahaan mengelola kekayaan berdasarkan perwalian, direktur yang adalah pemegang saham tersebut, juga bertanggung jawab sebagai wali.²⁶

Demikian juga, dalam praktek komersial, jika perusahaan akan mendapatkan pinjaman (dari bank misalnya), direktur yang adalah juga pemegang saham tersebut, diminta sebagai penjamin atas tanggung jawab perusahaan. Dalam kasus seperti ini, direktur diminta untuk menyerahkan rumah atau aset pribadi sebagai jaminan bagi tanggung jawab perusahaan. Jadi jika perusahaan gagal bayar kembali utang tersebut, maka rumah dan aset direktur yang dijaminakan tersebut diserahkan ke pihak kreditur (misalnya bank).²⁷

2. Doktrin PVC dan Direktur di Australia

Demikian juga, direktur baik menurut tradisi *common law* maupun UU Perusahaan, tidak dapat dihukum ketika menjalankan tugasnya dengan kepedulian dan kehati-hatian (*duty of care and diligence*) dan ketika menjalankan tugasnya dengan itikad

²³ Yang dimaksud dengan *company limited by shares* artinya 'sebuah perusahaan yang dibentuk dengan prinsip dimana para pemegang sahamnya memiliki kewajiban terbatas pada jumlah yang dimilikinya, dan (jika ada), saham yang belum dibayarkan, tanggung jawab terbatas pada jumlah saham yang belum dibayarkan yang dimiliki masing-masing pemegang saham tersebut' S 9 (*dictionary*) of the Australian Corporations Act 2001.

²⁴ Yang dimaksud dengan *company limited by guarantee* adalah 'sebuah perusahaan yang dibentuk dengan prinsip dimana anggotanya memiliki tanggung jawab terbatas pada jumlah masing-masing yang berkontribusi anggotanya pada kekayaan perusahaan jika perusahaan ditutup'. S 9 (*dictionary*) of the Australian Corporations Act 2001.

²⁵ Corporations Act 2001, S 1.2 .

²⁶ The Australian Corporations Act 2001, Ss 1.2, 1.3.

²⁷ The Australian Corporations Act 2001, Ss 1.2, 1.4.

baik untuk kepentingan terbaik perusahaan dan untuk tujuan yang layak (*fiduciary duties*)²⁸ atau *duty of loyalty* (dalam versi Amerika).

Demikian pula, terkait tugas fidusia, ditegaskan bahwa direktur harus bertindak dengan itikad baik untuk kepentingan terbaik perusahaan dan untuk tujuan yang layak (*duty to act in good faith in the best interests of the company and for a proper purpose*).²⁹

UU Perusahaan secara tegas dan eksplisit mengatur bahwa pelanggaran atas kedua tugas utama yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, dapat membuat direktur tersebut bertanggung jawab untuk sejumlah denda, bahkan dipidana penjara. Seorang direktur melakukan sebuah kejahatan pidana jika:

- a. direktur tersebut bertindak secara tidak hati-hati atau sembrono atau tanpa perhitungan (*reckless*);
- b. secara sengaja bertindak tidak jujur (*intentionally dishonest*);
- c. gagal (*fail*) dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan terbaik perusahaan dan tujuan yang layak;
- d. menggunakan posisinya sebagai direktur secara tidak jujur dan secara sembrono (*reckless*), langsung atau tidak langsung yang membuat dirinya atau pihak lain memperoleh ketuntungan atau menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
- e. menggunakan informasi yang diperolehnya sebagai direktur dengan tidak jujur dan secara sembrono (*reckless*), langsung

atau tidak langsung yang membuat dirinya atau pihak lain memperoleh ketuntungan atau menimbulkan kerugian bagi perusahaan.³⁰

Direktur yang gagal dalam menjalankan tugasnya dapat dinyatakan bersalah:³¹

- a. atas pelanggaran pidana dengan hukuman \$ 200.000 atau penjara hingga 5 tahun, atau keduanya;
- b. atas pelanggaran ketentuan hukuman sipil (dan pengadilan dapat memerintahkan orang tersebut untuk membayar kepada Pemerintah Australia sejumlah hingga \$ 200.000);
- c. secara pribadi bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada perusahaan atau orang lain atas kerugian atau kerusakan yang mereka derita; dan
- d. dilarang mengelola perusahaan.

Dengan demikian, baik pemegang saham maupun direktur dilindungi oleh cadar/tirai perusahaan sepanjang pemegang saham tidak menggunakan posisi dominannya untuk mengontrol perusahaan dalam melakukan kejahatan dan direktur memiliki kekebalan selama direktur tersebut menjalankan tugasnya dengan penuh kepedulian dan kehati-hatian dan dengan itikad baik untuk kepentingan terbaik perusahaan dan untuk tujuan yang layak. Jika sebaliknya yang terjadi, maka baik pemegang saham dan direktur harus bertanggung jawab atau tirai pelindung itu harus diangkat (PVC).

²⁸ The Australian Corporations Act 2001, S 180 (1).

²⁹ The Australian Corporations Act 2001, S 180 (1).

³⁰ The Australian Corporations Act 2001, S 184 (1) (2) (3).

³¹ The Australian Corporations Act 2001, S 5.3.

3. Penerapan Doktrin PVC oleh Pengadilan di Australia

Dalam praktek terkait interpretasi dan penegakan doktrin PVC,³² pengadilan di Australia mengakui bahwa cadar perusahaan dapat dibuka untuk menolak perlindungan yang diberikan dalam konsep PT. PVC merujuk pada pengecualian yang diberlakukan oleh pengadilan terhadap prinsip entitas hukum terpisah (*separate legal entity principle*), dimana pengadilan mengabaikan pemisahan dan tanggung jawab seorang pemegang saham atas tindakan perusahaan seolah seperti tindakan pemegang saham itu sendiri.³³ Pengadilan dapat juga membuka cadar perusahaan atas permintaan perusahaan itu sendiri (melalui direktur) atau pemegang saham dalam perusahaan tersebut, dalam rangka mengupayakan sebuah sanksi yang kalau saja ditolak, dapat mengurangi hak atau hukuman yang seharusnya diperoleh.³⁴

Pengadilan di Australia juga telah mengkonfirmasi lima persoalan utama yang dapat membuat cadar/tirai perusahaan tersebut dibuka yakni:³⁵

- a. Persoalan keagenan (*agency* atau *alter ego*): ketika pemegang saham dalam tingkat tertentu secara efektif mengontrol perusahaan sehingga tindakan pemegang saham seolah tindakan perusahaan.
- b. Tindakan curang (*fraud*) dimana perusahaan digunakan pihak yang

mengontrol untuk melakukan tindakan curang.

- c. Tindakan pemalsuan (*sham or facade*) dimana perusahaan digunakan pihak yang mengontrol sebagai masker (*mask*) untuk mencapai tujuan yang disembunyikan, umumnya yang bersifat ilegal dan menipu.
- d. Persoalan dalam kelompok usaha dimana kelompok usaha dalam keadaan tertentu dioperasikan dengan cara dimana dapat membuat anggota usaha tidak dapat dibedakan misalnya terdapat tupang tindih direktur, pejabat atau pekerja, atau ketika terdapat keadaan kerjasama antara perusahaan dalam sebuah kelompok usaha, atau kepemilikan bersama, sehingga perusahaan induk dimintai pertanggungjawabannya.
- e. Persoalan ketidakjujuran (*unfairness*) atau untuk mendapatkan keadilan (*justice*) dimana tirai perusahaan dapat dibuka untuk mendapatkan hasil yang lebih jujur atau adil atau untuk menghentikan suatu keadaan yang dapat mengakibatkan hasil yang tidak jujur.

Dengan demikian perlindungan terhadap (*corporate veil*) bagi direktur dan pemegang saham di Australia dapat diangkat jika pemegang saham telah secara dominan menggunakan posisinya dalam perusahaan untuk kepentingan ilegal atau kejahatan, dan jika direktur bertindak curang, tidak jujur atau kejahatan, termasuk jika

³² Untuk penerapan doktrin PVC di Australia, lihat juga Jason Harris and Anil Hargovan, 'Cutting the Guardian Knot of Corporate Law' *Australian Journal of Corporate Law* (2011) 26 (1) 39-54; lihat juga Helen Anderson, 'Piercing the Veil on Corporate Groups in Australia: the Case for Reform' (2009) 33 (2) *Melbourne University Law Review* 333-367.

³³ Ian M. Ramsey and David B. Noakes, 'Piercing the Corporate Veil in Australia' (2001) 19 (4) *Company and Securities Law Journal* 250, 250.

³⁴ *Ibid.*, 251.

³⁵ *Ibid.*, 257-268.

perusahaan tersebut hanya sebuah kedok palsu.

Konstruksi Doktrin PVC di Indonesia

1. Doktrin PVC, Konsep *Limited Liability* dan Pertanggungjawaban Pemegang Saham di Indonesia

Sebagaimana di Inggris dan Australia, di Indonesia pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas pada saham yang dimilikinya (*limited liability*). Bahkan di Indonesia, terkait aspek pertanggungjawaban pemegang saham, sejak awal, sebelum lahirnya UU PT, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) telah menganut pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) tersebut.

Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (2) KUHD yang menyebutkan bahwa “para persero atau pemegang saham tersebut tidak bertanggung jawab untuk lebih dari pada jumlah penuh andil tersebut”. Dengan kata lain, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas porsi saham atau modalnya. KUHD memang tidak mengatur lebih jauh apakah dalam kedudukannya sebagai pemegang saham, pemegang saham tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya melampaui modalnya dan dalam hal apa.

2. Doktrin PVC dalam UU Perseroan Terbatas

Saat UU No. 1 Tahun 1995 sebagaimana diganti dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), konsep pertanggungjawaban pemegang saham masih sama seperti yang dianut dalam KUHD. Pasal 3 ayat (1)

UU PT mengatur bahwa ‘pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki’. Tetapi tidak sebagaimana KUHD yang tidak mengatur soal PVC, UU PT mengadopsi doktrin PVC dengan eksplisit bagi pemegang saham yakni tirai pelindung pemegang saham bisa dicabut untuk sejumlah alasan (Pasal 3 ayat (2) UU, Pasal 7 ayat (5, 6)). Dengan kata lain pertanggungjawaban terbatas pemegang saham tidak berlaku mutlak.

Penerapan konsep pertanggungjawaban terbatas di atas sebenarnya lebih merupakan konsekuensi dari badan hukum perseroan terbatas tersebut. Pasal 1 ayat (1) UU PT menggariskan bahwa PT adalah ‘badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta peraturan pelaksanaannya’. Definisi ini menyiratkan bahwa perseroan adalah sebuah entitas hukum (*recht person*) yang terpisah (*separated legal entity*) dari pemegang saham sekaligus direktur dan komisaris perseroan sebagaimana juga dianut di Inggris dan Australia.

Secara prinsip, direktur dan komisaris juga memiliki tanggung jawab bagi perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam UU PT yang harus dijalankan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian dan kepedulian dan untuk kepentingan perusahaan (Pasal 1 ayat (5), Pasal 92 (1), Pasal 97 ayat (1, 2, 5), Pasal 104 ayat (4) huruf (b), Pasal 1 ayat (6), Pasal 108 ayat (1, 2),

dan Pasal 114 ayat (1), (2), dan (5) huruf (b)). Artinya baik direktur maupun komisaris tidak dapat dituntut sepanjang tindakannya didasari pada itikad baik, kehati-hatian dan untuk kepentingan terbaik perusahaan.

Tetapi jika direktur atau komisaris melakukan tindakan sebaliknya, yakni tindakan dengan itikad buruk, lalai, ceroboh dan bertentangan (merugikan) kepentingan perusahaan, atau bahkan membuat perusahaan mengalami kebangkrutan, keduanya bisa dimintai pertanggungjawaban (Pasal 104 ayat (4) huruf (b), Pasal 97 ayat (5), Pasal 115 ayat (3) huruf (b), Pasal 114 ayat (5) huruf (b)).

3. Doktrin PVC dalam UU PT Bagi Pemegang Saham Di Indonesia

Doktrin PVC dapat diterapkan atau cadar pelindung bagi pemegang saham ini bisa diangkat jika terdapat:

- a. ketidaklengkapan syarat perusahaan sebagai badan hukum;
- b. itikad buruk pemegang saham dalam memanfaatkan perusahaan bagi kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum;
- d. pemegang menggunakan aset perseroan sehingga perusahaan tidak dapat melunasi utangnya (Pasal 3 ayat (1) dan (2));
- e. tidak dipenuhinya syarat minimal dua pemegang saham enam bulan setelah berubahnya komposisi pemegang saham (Pasal 7 ayat (5) dan (6)).

4. Doktrin PVC dalam UU PT Bagi Direktur di Indonesia

Doktrin PVC dapat diberlakukan kepada direktur atau tirai pelindung bagi direktur dapat diangkat ketika:

- a. Direktur tidak melengkapi syarat-syarat pendirian PT. Ketika syarat

belum dipenuhi, perusahaan belum memiliki status badan hukum. Oleh karena itu jika perusahaan melakukan perbuatan hukum maka pendiri perusahaan, direktur dan komisaris ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng.

- b. Direktur melanggar tujuan perusahaan, kepentingan perusahaan, anggaran dasar, dan UU atau direktur bertindak di luar kewenangannya atau *ultra vires* (Bandingkan Pasal 1 ayat (5), Pasal 97 ayat (5) huruf (b), Pasal 104 ayat (4) huruf (b)).
 - c. Direktur melanggar tugas fidusia yakni tugas untuk bertindak dengan itikad baik dan untuk kepentingan terbaik perusahaan dan melanggar tugas untuk peduli dan berdasarkan keahliannya yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan (Pasal 97 ayat (3) dan (5)).
 - d. Direktur melanggar tugas fidusia yakni tugas untuk bertindak dengan itikad baik dan untuk kepentingan terbaik perusahaan dan melanggar tugas untuk peduli dan berdasarkan keahliannya yang mengakibatkan perusahaan mengalami kepailitan (Pasal 97 ayat (3), Pasal 104 ayat (2)).
 - e. Direktur menyiapkan laporan keuangan yang menyesatkan atau tidak benar (Pasal 69 ayat (3)).
- ### 5. Doktrin PVC dalam UU PT bagi Komisaris di Indonesia

Doktrin PVC dapat diberlakukan kepada komisaris atau perlindungan bagi komisaris dapat diangkat pengadilan ketika:

- a. Komisaris melanggar tugas fidusia yakni tugas untuk melakukan

- pengawasan perusahaan dan usaha perusahaan dan memberi nasihat kepada direktur dimana bertindak dengan itikad baik dan untuk kepentingan terbaik perusahaan dan melanggar tugas untuk peduli dan berdasarkan keahliannya yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan (Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 114 ayat (3)).
- b. Komisaris melanggar tugas fidusia yakni tugas untuk bertindak dengan itikad baik dan untuk kepentingan terbaik perusahaan dan melanggar tugas untuk peduli dan berdasarkan keahliannya yang mengakibatkan perusahaan mengalami kepailitan (Pasal 108 ayat (1, 2), Pasal 115 ayat (1)).
 - c. Komisaris menyiapkan laporan keuangan yang menyesatkan atau tidak benar (Pasal 69 ayat (3)).
6. Penerapan Doktrin PVC oleh pengadilan di Indonesia kepada Pemegang Saham

Sejak berlakunya UU PT, sejauh yang diikuti penulis, belum ada satupun kasus yang diputuskan pengadilan terkait penerapan doktrin PVC. Putusan terkait PVC yang diambil MA Republik Indonesia (selanjutnya disebut MARI) justru terjadi jauh sebelum berlakunya UU PT. MARI membebaskan pemegang saham untuk bertanggung jawab secara pribadi pribadi dalam kedudukannya sebagai pemegang saham terjadi untuk pertama kalinya tahun 1973. Hal ini terlihat dalam

putusan MARI No. 21 K/Sip/1973, tanggal 5 November 1973. Dalam perkara antara PT. Perusahaan Pelayaran Samudra "Gesuri Lloyd" melawan O. Sibarani (PT. Toko Tujuh Belas). MARI menggunakan KUHD sebagai dasar untuk mengadili kasus ini dan menyatakan bahwa sebagai pemegang saham, O. Sibarani, yang sekaligus duduk sebagai anggota direksi dari perseroan, bertanggung jawab karena telah melanggar syarat pendirian perseroan serta telah memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, kekayaan pribadi O. Sibarani dapat dipakai untuk membayar hutang perseroan.³⁶

Dalam menanggapi kasus di atas, Sulistiowati dan Veri Antoni berpendapat bahwa seharusnya pemegang saham perlu memastikan bahwa setelah perseroan memperoleh status badan hukumnya dan pemegang saham kurang dari dua orang, maka dalam masa tidak lebih dari enam bulan, pemegang saham tersebut harus mengalihkan saham kepada pihak lain atau perseroan harus mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Jika tidak, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan.³⁷ Dalam pandangan Sulistiowati dan Veri Antoni, substansi putusan ini yang kemudian diakomodasi dalam Pasal 7 Ayat (4) UU No. 1 Tahun 1995 dan selanjutnya dalam Pasal 7 Ayat (5) UU PT.³⁸

³⁶ Heryanto Gunawan, 'Analisis Hukum Doktrin Alter Ego and Piercing the Corporate Veil Yang Dianut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas' (Tesis, Fakultas Hukum UI 2009) 60.

³⁷ Sulistiowati dan Veri Antoni, 'Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia' (2013) 2 (3) Yustisia 2013 23, 31.

³⁸ *Ibid.*, 32.

7. Penerapan Doktrin PVC oleh Pengadilan di Indonesia kepada Direktur dan Komisaris

Terdapat satu putusan MARI yang didasarkan pada KUHD. Kasus antara PT Pembangunan Asia melawan PT Djaja Tunggal dkk. Kasus ini³⁹ didaftarkan kasusnya ke MARI tahun 1991 dengan nomor perkara: No.1916 K/Pdt/1991, yang diputuskan MARI tahun 1996.⁴⁰ Inti kasus ini adalah penggugat menggugat para tergugat karena para tergugat melakukan permufakatan jahat pada saat mengajukan pinjaman kepada penggugat yang kemudian merugikan penggugat. Para tergugat mengajukan pinjaman kepada penggugat dan disetujui. Dalam perjalanan, para tergugat 1 (PT Djaja Tunggal) bankrut dan tidak dapat membayar kembali utangnya kepada penggugat.

Ketika masalah dibawa ke tingkat kasasi, MARI menemukan adanya modus licik yang dipakai oleh para tergugat. Para tergugat yang adalah direktur dan komisaris yang sama pada dua perusahaan berbeda yakni PT Bank Pembangunan Asia dan PT Djaja Tunggal, maka ketika PT Djaja Tunggal mengajukan kredit ke PT Bank Pembangunan Asia, kredit diberikan begitu saja tanpa analisis kredit yang cermat dan agunan Hak Guna Bangunan (HGB) yang diajukan para tergugat sesungguhnya telah

habis masa berlakunya dan menjadi milik negara.

Jadi dalam kasus ini terbukti bahwa perusahaan digunakan oleh para direktur dan komisaris sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan penipuan untuk memperoleh pinjaman bank. Dalam konteks seperti ini, MARI dengan tegas menyatakan bahwa direktur dan komisaris bertanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan perusahaan yang dilakukan dengan itikad jahat.

Dengan demikian perlindungan terhadap (*corporate veil*) bagi direktur dan pemegang saham di Indonesia dapat diangkat jika terdapat alasan teknis dan substantif untuk itu. Secara teknis, tidak terpenuhinya persyaratan pendirian ataupun pemegang saham minimum (dua) dapat membuat pemegang saham bertanggung jawab secara hukum. Secara substantif, pemegang saham, direktur dan komisaris dapat dituntut jika mereka menggunakan posisinya secara salah untuk melakukan kejahatan atau kecurangan.

Penyelesaian di Luar Pengadilan untuk Mengangkat Tirai Pelindung bagi Pemegang Saham

Menarik untuk disimak bahwa pemegang saham yang belum terbukti bersalah di pengadilan karena melanggar kewajibannya, diminta

³⁹ Kasus ini dimulai ketika Penggugat (PT Bank Pembangunan Asia) menggugat PT Djaja Tunggal (T 1) dan empat Tergugat lainnya (T II, III, IV, V) lainnya di Pengadilan Negeri Bogor tahun 1997, dengan nomor perkara: No.136/Pdt.G/1987/PN.Bgr dan diputus tahun 1988. Satu tahun kemudian, Penggugat melakukan Banding di Pengadilan Tinggi Bandung dengan nomor perkara: No. 431/P/1989/PT. Bdg dan diputus PT Bandung tahun 1990.

⁴⁰ Uraian yang dipakai merujuk pada Adi Seno, Kaitan Doktrin Piercing The Corporate Veil Dengan Doktrin Business Judgement Rule pada Perseroan Terbatas di Indonesia, <https://www.academia.edu/14245248/Kaitan_Doktrin_Piercing_The_Corporate_Veil_Dengan_Doktrin_Business_Judgement_Rule_pada_Perseroan_Terbatas_di_Indonesia> diakses 26 Agustus 2019.

bertanggung jawab dan harus mengembalikan atau membayar utang perusahaan melampaui batas saham yang dimilikinya. Hal ini terlihat dalam kasus penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh 48 Bank di Indonesia tahun 1998-2006.

Sebagaimana diketahui tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang diakibatkan oleh depresiasi rupiah terhadap dollar US. Banyak sektor terkena imbas krisis keuangan ini, termasuk perbankan nasional. Singkatnya, karena kebanyakan bank memiliki kewajiban dalam bentuk dollar US maka ketika rupiah terdepresiasi tajam terhadap dollar US, dengan sendirinya kewajiban bank meningkat. Akibatnya, bank mengalami kesulitan likuiditas. Untuk menyelamatkan kesulitan likuiditas ini, Bank Indonesia (BI) menjalankan fungsi *lender of last resort*-nya dengan mengambil kebijakan BLBI. Terdapat 48 Bank menerima skema BLBI ini. Dalam perkembangannya, mayoritas bank-bank ini tetap saja tidak bisa terselamatkan alias ditutup. Tetapi bagaimanapun BLBI yang telah digelontorkan merupakan kewajiban yang harus dikembalikan (dibayar kembali) oleh pihak bank penerima BLBI kepada BI.⁴¹

Dalam perkembangan penyelesaian kasus BLBI, menarik untuk di simak bahwa tagihan BI kepada bank penerima BLBI dialihkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Singkatnya, BPPN, atas mandat yang diterima dari Komite Kerja Sektor Keuangan, berusaha

menyelesaikan tagihan BLBI ini dengan bank penerima BLBI. Perlu diketahui bahwa sebelum hak tagih BI atas BLBI dialihkan ke BPPN, Dewan Perwakilan Rakyat telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi atas aset-aset bank penerima BLBI tersebut. Audit BPK menunjukkan hasil yang mencengangkan. Berdasarkan estimasi BPK terhadap nilai komersial dari Nilai Pertanggungan Hak Jaminan dari keseluruhan aset 48 bank penerima BLBI yang diserahkan ke BI adalah sangat kecil yakni hanya sejumlah Rp 12,3 Triliun dari total kewajiban BLBI sebesar Rp 144,5 triliun.⁴²

Apa arti temuan di atas? Jelas bahwa dengan nilainya yang sangat kecil, aset ke 48 bank tersebut tidak dapat melunasi kewajiban BLBI tersebut. Bagaimana mengatasi persoalan ini? Untuk menjawab persoalan ini, BPPN, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, mengambil langkah di luar kelaziman hukum. Lazimnya, jika terjadi penyalahgunaan penguasaan perseroan atau pengawasan perseroan yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian atau kebangkrutan, dalam hal ini penyalahgunaan dana BLBI untuk kepentingan di luar perusahaan, direktur dan komisarislah yang harus dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan secara tanggung renteng membayar kewajiban perusahaan (Pasal 85 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 98 ayat (2) UU PT. UU PT dirujuk karena pada saat terjadinya kasus BLBI, UU PT yang berlaku).

⁴¹ Terkait kasus BLBI ini, lihat Syafrudin A. Tumenggung, *Bencana BLBI dan Krisis Ekonomi Indonesia* (Rajawali Press Depok 2019) 39-42.

⁴² *Ibid.*, 39-41.

Langkah lainnya yang seharusnya ditempuh, dari sisi pemegang saham, ialah pemegang saham dapat melakukan gugatan derivatif kepada direktur dan komisaris karena mereka telah tidak menjalankan tugasnya dengan itikad baik sehingga menimbulkan kerugian atau kebangkrutan perusahaan sehingga persahaan tidak dapat membayar hutangnya.⁴³ Tetapi langkah ini pun tidak ditempuh oleh para pemegang saham bank penerima BLBI.

Sementara itu, di sisi lain, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU PT, ditegaskan bahwa 'pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya'. Pemegang saham hanya dapat dimintai pertanggungjawabannya jika (PVC):⁴⁴

- a. memiliki itikad buruk dalam memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perusahaan; atau
- c. pemegang saham telah menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan perusahaan tidak cukup melunasi hutang perseroan.

Dalam kasus BLBI, memang ada sejumlah pemegang saham yang tidak

kooperatif dan telah dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan.⁴⁵ Tetapi bagi pemegang saham yang kooperatif, oleh BPPN ditawarkan penyelesaian di luar pengadilan (*out of court settlement*). Pendekatan ini tentu di luar kelaziman hukum perusahaan atau arus utama hukum perusahaan. BPPN memberikan ide penyelesaian di luar skema hukum yang ada pada UU PT dengan menawarkan dua solusi kunci saat itu yakni 1) *Master Settlement and Acquisition Agreement* (MSSA) dan 2) *Master Refinancing Note Issuance Agreement* (MRNIA). Dalam skema MSSA, disepakati formula sederhana yakni kewajiban bank dikurangi nilai aset yang sebelumnya telah dikurangi kredit kepada pihak terkait (*affiliated loans*). Hasil pengurangan ini yang dijadikan sebagai Jumlah Kewajiban Pemegang Saham yang harus dibayarkan ke BPPN. Cara membayarnya ialah pemegang saham menyerahkan sahamnya ke BPPN dan jika dihitung BPPN saham yang diserahkan tersebut telah memiliki nilai yang sama dengan JKPSnya, maka BPPN membuat pernyataan tertulis berupa *release and discharge* atau surat keterangan lunas kepada pemegang saham dimana didalamnya dinyatakan bahwa pemegang saham telah menyelesaikan kewajiban BLBI kepada BPPN (pemerintah).⁴⁶

Sementara itu, dalam skema MRNIA, untuk mendapatkan hasil

⁴³ Pasal 85 ayat (3) dan Pasal 90 ayat (2) UU PT.

⁴⁴ Pasal 3 ayat (2) UU PT.

⁴⁵ Antara lain: Indonesia Corruption Watch 'Perkara Korupsi BLBI Rp 583 Miliar: Hendrawan Haryono Belum Juga Dieksekusi' (2004) <<https://antikorupsi.org/id/news/perkara-korupsi-blbi-rp-583-miliar-hendrawan-haryono-belum-juga-dieksekusi-230704>> diakses 2 September 2019; Indonesia Corruption Watch, 'Bos Bank Surya Segera Dipulangkan dari Australia' (2006) <<https://antikorupsi.org/id/news/bos-bank-surya-segera-dipulangkan-dari-australia>> diakses 2 September 2019; Kontan, <<https://nasional.kontan.co.id/news/koruptor-blbi-samadikun-hartono-lunasi-seluruh-ganti-rugi-ke-negara>> diakses 2 September 2019; dan Antara News <<https://www.antarane.ws.com/berita/26352/terpidana-blbi-david-nusa-wijaya-dieksekusi-ke-lp-salemba>> diakses 2 September 2019.

⁴⁶ *Ibid.*, 66-67.

akhir kewajiban pemegang saham, formula perhitungannya sama dengan MSAA, dimana pemegang saham tetap menyerahkan saham dan asetnya, namun jika nilai aset dan saham tersebut belum memenuhi JKPS-nya, maka pemegang saham diminta untuk menyerahkan jaminan pribadi (*personal guarantee*). Dalam skema MRNIA, aset tetap dijual oleh pemegang saham atas persetujuan BPPN, dan hasil penjualan disetorkan langsung ke BPPN. Jika penjualan aset ini tidak mencukupi JKPS, maka pemegang saham wajib melunasinya. Sebelum pemegang saham melunasi JKPS-nya maka BPPN tidak menerbitkan SKL.⁴⁷

Terlepas dari pertanyaan terkait efektifitas *out of court settlement* melalui MSAA dan MRNIA sebagai skema untuk mengembalikan piutang pemerintah dalam konteks BLBI, model *out of court settlement* telah merupakan sebuah terobosan hukum di luar pengadilan untuk memecah kebuntuan penyelesaian skandal BLBI saat itu, sebuah pendekatan *extra judicial* yang dilakukan oleh lembaga eksekutif.

Mengapa? Jawabannya adalah karena berdasarkan doktrin dalam tradisi *common law* dan kewajiban dalam UU PT (*statutory obligation*), PVC hanya bisa dilakukan oleh pengadilan. Dengan demikian, dalam konteks penerapan doktrin PVC, apa yang dilakukan BPPN sesungguhnya telah melahirkan pula sebuah doktrin hukum baru di luar kelaziman hukum perusahaan. Skema MSAA dan

MRNIA, sebenarnya merupakan sebuah model *out of court settlement* to PVC atau pendekatan *extra judicial*. Dalam model ini, pemegang saham diminta untuk bertanggung jawab melampaui sahamnya tanpa melalui proses pengadilan.

PENUTUP

Persoalannya ialah apakah direktur dan pemegang saham dapat dituntut? Bagaimana, kapan dan dalam hal apa direktur (dan komisaris dalam konteks Indonesia) dan pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban pribadinya atau dalam hal apa doktrin (PVC)⁴⁸ dapat diterapkan pengadilan. Persoalan yang lebih krusial di Indonesia adalah apakah pertanggungjawaban pemegang saham yang melebihi sahamnya dapat dilakukan di luar pengadilan?

Penerapan doktrin PVC di Inggris dan Australia dilakukan atas dasar tradisi *common law* dimana umumnya pengadilan di kedua negara tersebut mengangkat tirai pelindung bagi pemegang saham dan direktur karena adanya praktek kecurangan dan penipuan, adanya *implied agency* antara persahaan induk dan anak perusahaan penggunaan anak perusahaan untuk menghindari kewajiban hukum, dan pendirian perusahaan dengan maksud untuk melakukan kejahatan.

Di Indonesia, berdasarkan yurisprudensi dibuat MARI jauh sebelum UU PT lahir, PVC bisa diangkat bagi pemegang saham jika tidak terpenu-

⁴⁷ *Ibid.*, 67.

⁴⁸ Doktrin PVC memiliki akar dalam tradisi *common law* yang berkembang di Inggris lalu menyebar ke negara yang dipengaruhi oleh tradisi *common law* seperti Amerika, Irlandia, Australia, Kanada, New Zealand, Afrika Selatan, dalam tingkat tertentu juga diadopsi di negeri negara dengan tradisi *civil law* seperti Jerman dan Indonesia. Tentang awal muasal lahirnya doktrin PVC dalam kaitannya dengan konsep perusahaan sebagai *separated legal entity*, lihat Larry S. Bryant, *Op.Cit.*, 343.

hinya jumlah pemegang saham yang disyaratkan dan permufakatan jahat direktur dan komisaris yang menyalahgunakan kedudukannya untuk melakukan kejahatan.

Selain itu, terdapat peristiwa hukum unik untuk meminta pertanggungjawaban pemegang saham. Dalam kasus BLBI, BPPN justru menerapkan model *out of court settlement* melalui MSAA dan MRNIA untuk meminta pertanggungjawaban pemegang saham melampaui sahamnya.

Penulis menyarankan agar berdasarkan yurisprudensi di Indonesia, tindakan penyalahgunaan posisi direktur dan komisaris untuk melakukan tindakan curang atau kejahatan perlu dikodifikasi dalam perubahan UU PT yang akan datang. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum terkait penerapan doktrin PVC di Indonesia.

Penulis juga menyarankan agar dilakukan kajian akademik baik hukum dan ekonomi terkait model *out of court settlement* untuk mengangkat tirai perlindungan perusahaan (PVC) terhadap pemegang saham. Selanjutnya, berdasarkan praktek ini, direkomendasikan agar dalam perubahan UU PT yang akan datang model ini dapat diakomodasi. Jika ini dilakukan, Indonesia merupakan negara pertama yang melakukan terobosan dengan mengatur praktek meminta pertanggungjawaban pemegang saham melampaui sahamnya di luar pengadilan dalam UU PT-nya.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Goulding S, *Company Law* (2nd edn, Caven dish Publishing Limited London 1999).
- Pettet B, *Company Law* (2nd edn, Pearson Education Limited 2005).
- Schneeman A, *The Law Of Corporations and Other Business Organizations* (5th edn Delmar Cengage Learning 2010).
- Tumenggung Syafrudin A, *Bencana BLBI dan Krisis Ekonomi Indonesia* (Rajawali Press Depok 2019).

Artikel Jurnal

- Anderson H, 'Piercing the Veil on Corporate Groups in Australia: The Case for Reform' (2009) 33 (2) Melbourne University Law Review.
- Berle Adolf A Jr, 'The Theory of Enterprise Entity' (1947) 47 (3) Columbia Law Review.
- Bordwin M, 'Piercing the Corporate Veil' (1995) 84 (8) Management Review.
- Bryant Larry S, 'Piercing the Corporate' (1982) 87 (6) Commercial Law Journal.
- Harris J and Hargovan A, 'Cutting the Gordian Knot of Corporate Law' (2011) 26 (1) Australian Journal of Corporate Law.
- Heintzman Thomas G, Q. C. & Kain B, 'Through the Looking Glass: Recent Developments in Piercing The Corporate Veil' (2013) 28 (3) Banking & Finance Law Review.
- Hunt S, 'Piercing The Corporate Veil' (1995) 13 (2) Paralegal Today.

Millier Sandra K, 'Piercing The Corporate Veil Among Affiliated Companies In The European Community And In The U.S.: A Comparative Analysis Of U.S., German, And U. K. Veil-Piercing Approaches' (1998) 36 (1) American Business Law Journal.

Ramsey Ian M and Noakes David B, 'Piercing the Corporate Veil in Australia' (2001) 19 (4) Company and Securities Law Journal.

Sulistiowati dan Antoni V, 'Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia' (2013) 2 (3) Yustisia.

Thompson R, 'Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study' (1991) 76 (5) *Cornell Law Review*.

Tesis

Gunawan H, 'Analisis Hukum Doktrin Alter Ego and Piercing the Corporate Veil Yang Dianut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas' (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2009).

Website

Burhani R, 'Terpidana BLBI David Nusa Wijaya Dieksekusi ke LP Salemba' (Antara News, 18 Januari 2006) <<https://www.antaranews.com/berita/26352/terpidana-blbi-david-nusa-wijaya-dieksekusi-ke-lp-salemba>> diakses 2 September 2019.

Indonesia Corruption Watch 'Perkara Korupsi BLBI Rp 583 Miliar; Hendrawan Haryono Belum Juga Dieksekusi' (ICW, 22 Juli 2004) <[https://antikorupsi.org/id](https://antikorupsi.org/id/news/perkara-korupsi-blbi-rp-583-miliar-hendrawan-haryono-belum-juga-dieksekusi-230704)

/news/perkara-korupsi-blbi-rp-583-miliar-hendrawan-haryono-belum-juga-dieksekusi-230704> diakses 2 September 2019.

Indonesia Corruption Watch, 'Bos Bank Surya Segera Dipulangkan dari Australia' (ICW, 26 September 2006) <<https://antikorupsi.org/id/news/bos-bank-surya-segera-dipulangkan-dari-australia>> diakses 2 September 2019.

Seno, Adi, Kaitan Doktrin Piercing The Corporate Veil Dengan Doktrin Business Judgement Rule pada Perseroan Terbatas di Indonesia, <https://www.academia.edu/14245248/Kaitan_Doktrin_Piercing_The_Corporate_Veil_Dengan_Doktrin_Business_Judgement_Rule_pada_Perseroan_Terbatas_di_Indonesia> diakses 26 Agustus 2019.

Winarto Y, 'Koruptor BLBI Samadikun Hartono Lunasi Seluruh Ganti Rugi ke Negara' (Kontan, 17 Mei 2018) <<https://nasional.kontan.co.id/news/koruptor-blbi-samadikun-hartono-lunasi-seluruh-ganti-rugi-ke-negara>> diakses 2 September 2019.

Putusan Pengadilan

P.T. Perusahaan Pelayaran Samudra "Gesuri Lloyd" v O. Sibarani (PT. Toko Tujuh Belas), Nomor 21 K/Sip/1973, Mahkamah Agung, 5 November 1973.

PT Bank Pembangunan Asia v PT Djaja Tunggal, Nomor 136/Pdt.G/1987/PN. Bgr, Pengadilan Negeri Bogor, 1988.

PT Bank Pembangunan Asia v PT Djaja Tunggal, No.431/P/1989/PT.Bdg, Pengadilan Tinggi Bandung, 12 Februari 1990.

PT Bank Pembangunan Asia v PT Djaja Tunggal, Nomor 1916 K/Pdt/

1991, Mahkamah Agung,
1996.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas.

The Corporations Act 2001 (Australia,
Cth).

The Companies Act 2006 (The UK).